

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat vital dan hal yang sangat penting dalam menunjang kelancaran atau kemudahan dalam proses pembelajaran, dalam kaitannya dengan pendidikan yang membutuhkan sarana dan prasarana dan juga pemanfaatannya baik dari segi intensitas maupun kreatifitas dalam penggunaannya oleh dosen maupun oleh praja dalam kegiatan belajar mengajar. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien.

Dalam perkembangan dunia pendidikan saat ini setiap lembaga pendidikan baik formal maupun non formal berusaha untuk memberikan dan melengkapi fasilitas yang ada di lembaganya untuk memenuhi kebutuhan dosen, staf-staf, dan semua praja. Dalam upaya melengkapi fasilitas yang ada sebuah lembaga pendidikan dikatakan maju apabila ketersediaan sarana dan prasarananya memadai berkaitan dengan proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar dapat meningkat dengan didukung adanya sarana dan prasarana yang memadai.

Penyusunan anggaran adalah suatu kegiatan yang penting dalam setiap SKPD maupun kelembagaan karena penganggaran berguna untuk membuat perencanaan, pengendalian dan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan dan aktivitas SKPD dan kelembagaan tersebut. Penyusunan anggaran itu memberikan

gambaran awal seberapa besar dana yang akan dikeluarkan sehingga penyimpangan-penyimpangan dapat diminimalisasi.

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) adalah lembaga Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan yang ada di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. IPDN didirikan untuk mempersiapkan kader pamong praja yang siap bekerja dalam rangka mewujudkan misi Departemen Dalam Negeri dan terdepan dalam mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. NahPentingnya anggaran bagi IPDN karena anggaran dapat digunakan sebagai alat pengendalian unit kerja, sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi, bagian dari instrumen politik dan instrumen kebijakan fiskal. Dengan adanya anggaran,kegiatan di IPDN dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama, menghindari pemborosan dan pembayaran pemerintahan yang kurang perlu, serta sumber daya pun dapat dimanfaatkan seefisien mungkin. Maka dari itu karyawan dan staff pun merasakan ketenangan atas adanya anggaran yang menunjukkan dengan jelas penggunaan uang mereka dan mengetahui ke arah pembangunan kampus IPDN dengan anggaran tersebut.

Anggaran dipakai untuk mengendalikan biaya dan menentukan bidang-bidang masalah dalam organisasi tersebut dengan membandingkan hasil kinerja yang telah di anggarkan secara periodik. Supaya anggaran itu tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan maka diperlukan kerjasama yang baik antara bawahan dan atasan, pegawai dan manajer dalam penyusunan anggaran. Karena proses penyusunan anggaran merupakan kegiatan yang penting dan kompleks, kemungkinan akan menimbulkan dampak fungsional dan disfungsional terhadap sikap dan perilaku anggota organisasi.

Menurut PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 25 disebutkan bahwa, (1) Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan, (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran, (3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi Satuan Pendidikan, (4) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan prinsip, (a.) menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif, (b.) menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan, (c.) ramah terhadap penyandang disabilitas, dan (d.) ramah terhadap kelestarian lingkungan.

Dalam setiap satuan pendidikan harus memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Setiap satuan pendidikan harus memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan Standar Sarana dan Prasarana, (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), (3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Luar Biasa.

Dengan latar belakang yang telah di uraikan diatas, penulis tertarik untuk mempelajari lebih dalam mengenai bagaimana penganggaran sarana dan prasarana di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sumatera Barat denganmelakukankegiatanmagang di kantorInstitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sumatera Barat dengan mengangkat topic penelitian yang berjudul **“Mekanisme Penganggaran Sarana Dan Prasarana Pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Ipdn) Kampus Sumatera Barat Tahun 2022”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka untuk membatasi ruang lingkup dalam penulisan tugas akhir ini, penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme penganggaran sarana dan prasarana pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Regional Sumatera Barat pada tahun 2022 ?
2. Apakah mekanisme penganggaran sarana dan prasarana di IPDN sudah sesuai dengan teori dan Undang-Undang ?

1.3 Tujuan Kegiatan Magang

Magang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Adapun tujuan dari kegiatan magang ini adalah

1. Untuk syarat untuk menyelesaikan studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Untuk mempraktekan ilmu teori yang di dapatkan di perkuliahan ke lapangan (instansi pemerintah) yang sesuai dengan jurusan di perkuliahan yaitu Keuangan Negara dan Daerah Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana Mekanisme Penganggaran Sarana dan Prasarana di Kampus IPDN Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Kegiatan Magang

Adapun manfaat dari magang ini di harapkan bisa memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan di antaranya :

1. Bagi penulis

- a. Mendapatkan pengalaman bagaimana tentang kondisi di dunia kerja.
 - b. Menambah wawasan dan pengalaman untuk nantinya bisa bekerja di bidang pemerintahan.
 - c. Dapat menerapkan ilmu teori yang telah di dapatkan di perkuliahan
 - d. Dapat mengetahui Mekanisme Penganggaran Sarana dan Prasarana pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat
2. Bagi tempat magang
- a. Sebagai sarana untuk meningkatkan hubungan antara IPDN Kampus Sumatera Barat dengan Universitas Andalas
 - b. Instansi pemerintah mendapatkan bantuan tenaga kerja dari mahasiswa/mahasiswi yang melakukan praktek magang.
3. Bagi pembaca

Laporan kerja praktik atau magang ini di harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca dan juga mengetahui Mekanisme Penganggaran Sarana dan Prasarana di IPDN Kampus Sumatera Barat

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan di Kampus IPDN Sumatera Barat Jl. Raya Bukittinggi-Payakumbuh, Tabek Panjang, Kec. Baso, Kabupeten Agam, Sumatera Barat. Pelaksanaan waktu magang dilakukan selama 40 hari kerja.

1.6 Sistematika Penulisan Laporan

Agar lebih fokus pada pokok pembahsan yang telah di ajukan, adapun sistematika laporan magang ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang pengertian mekanisme, manfaat mekanisme, pengertian penganggaran, pengertian anggaran, karakteristik anggaran, fungsi anggaran, keuntungan pemakaian anggaran, tujuan dan manfaat anggaran, serta pengertian sarana dan prasarana, fungsi sarana dan prasarana, ruang lingkup sarana dan prasarana dan contoh sarana dan prasarana.

BAB III : GAMBARAN UMUM

Menggambarkan tentang gambaran umum Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sumatera Barat, visi dan misi, tugas pokok, struktur organisasi IPDN.

BAB IV : PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang bagaimana mekanisme penganggaran sarana dan prasarana di institut pemerintahan dalam negeri (IPDN) kampus sumatera barat tahun 2022 dan apakah mekanisme penganggaran sarana dan prasarana di institut pemerintahan dalam negeri (IPDN) kampus sumatera barat tahun 2022 sudah sesuai teori dan undang undang.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.